



# Disdik Siapkan Sanksi

## SMK 7 Bersikukuh Tahan Ijazah Siswa

**YOGYAKARTA** – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta menyiapkan sanksi bagi SMK 7 Yogyakarta yang menahan ijazah siswanya karena belum melunasi biaya pendidikan.

Selain menyalahi aturan, mendapatkan ijazah adalah hak siswa setelah menyelesaikan pendidikan.

Karena telah melanggar ketentuan, pihaknya akan memberikan tindakan tegas kepada sekolah tersebut, terutama kepala sekolahnya. Bentuk sanksinya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

“Yang jelas, kepala sekolah

akan mendapatkan peringatan dari kami secepatnya,” kata Kepala Disdik Yogyakarta Edy Heri Suasana kemarin.

Disdik akan segera berkoordinasi dengan staf untuk membahas kasus ini. Terutama untuk memproses bentuk sanksi tepat yang akan diberikan. Sebelum itu, Disdik akan mengklarifikasi Kepala SMK 7 Yogyakarta.

“Dari hasil tersebut, nantinya yang akan dijadikan acuan untuk memberikan sanksi kepada sekolah tersebut,” tandas Edy.

Sementara itu, Kepala SMK 7 Yogyakarta Titi Komah Nurastuti menerangkan, pada dasarnya pihaknya tidak akan mempersulit siswa yang lulus mendapatkan ijazah.

Namun, kewajiban siswa seperti pembayaran uang sekolah maupun administrasi lain tetap harus diselesaikan. Tentu ada konsekuensi bila pembayaran uang sekolah belum beres. Misalnya saja dengan penundaan pemberian ijazah.

“Itulah salah satu alasan

mengapa kami belum memberikan ijazah siswa yang belum melunasi uang sekolah tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, penahanan ijazah tersebut bertujuan untuk mendidik masyarakat. Jika tetap diberikan, justru dikhawatirkan akan membuat orangtua lepas tangan terhadap pendidikan anaknya, terutama dalam hal pembiayaan. Meski kebijakan tersebut ditentang banyak orang, tetap dilaksanakan.

“Sebenarnya SMK 7 Yogyakarta dengan orang tua siswa sudah melakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga nanti-

nya diharapkan ada *win win solution* yang tidak merugikan kedua belah pihak,” paparnya.

Menanggapi pernyataan Kepala Disdik Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana yang menyatakan tindakan penahanan ijazah siswa tidak dibenarkan dan akan diberikan sanksi, Titi enggan berkomentar. Alasannya, dia perlu mengklarifikasi hal itu kepada Kepala Disdik.

“Kami melakukan tindakan ini, tujuannya untuk pembelajaran. Terlebih untuk pembiayaan sekolah bagi anak dari keluarga miskin, ada berbagai macam sumber pendanaan, seperti BKM, Bosda, maupun donatur. Sehingga masalah ini ti-

dak akan terjadi,” tandasnya. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi berharap persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut.

Ijazah diharapkan segera diberikan dan dapat digunakan siswa untuk melanjutkan pendidikan maupun melengkapai persyaratan saat melamar pekerjaan atau keperluan lain.

“Hal yang penting dalam menyelesaikan masalah ini, harus ada kebijakan dan *win win solution* yang tidak merugikan kedua belah pihak,” tandas politikus PAN ini.

● priyosetyawan api

Dihaturkan Kepada

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah Yogyakarta
4. Asisten ..... Yogyakarta

Tembusan Kepada Y.....

1. ....
2. ....

| Instansi            | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|---------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Pendidikan | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 16 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005